

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS APLIKASI *SILASIDAKEP* DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA

**Fepi Febianti*, Desy Farida Valeria, Intan Annisa, Ode Sopian, Ramdan,
Tendiyana Nugraha**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

*Corresponding Email: fepifebianti@unsap.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the management information system policy for the Silidakep application and the constraints of the implementation of the information system in North Sumedang District are able to optimize the work of employees serving the community in the field of population and civil registration. Data was collected through library and field studies including: observation, interviews, documentation studies and triangulation. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling. Furthermore, data analysis was carried out by referring to the technical analysis of the Miles and Huberman model, namely: data reduction (data reduction), data display (data presentation), and conclusion drawing/verification (conclusions). The implementation of the policy on the use of the siladakep application at the North Sumedang District Office has been running but is still not good. This happened because of obstacles such as: (1) Lack of understanding of the siladakep application because the community had not received comprehensive socialization, (2) the community had not received comprehensive socialization, one of which was caused by most of the employees not mastering the siladakep application, (3) The lack of stability of the internet network due to the use of this siladakep application, the main element is the internet network as a supporter of access to the entry of the application. With the end of writing this report, our researchers suggest that the leadership of the North Sumedang District Office should further improve the facilities in the office, and give more attention to employees so that they are more aware of carrying out and completing their duties optimally.

Keyword: Public Policy, Implementation of Public Policy.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa sangat pesat, sehingga menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk juga dalam pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Sumedang Utara. Karena adanya pandemi Covid-19 pelayanan dan aktivitas yang ada di Kecamatan tersebut sedikit terhambat, namun Kantor Kecamatan Sumedang Utara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang dapat memperlancar aktivitas tersebut.

Terkait dengan *pandemi* Covid-19 yang belum usai, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang sistem informasi manajemen berbasis aplikasi bernama *SilaSidakep*, yang di dalamnya terdapat jenis-jenis pelayanan yang berkaitan untuk mengurus dokumen kependudukan. Program tersebut dibuat dalam upaya menetapkan sistem inovasi pelayanan di bidang kependudukan, etap memberikan pelayanan bagi masyarakat secara daring untuk meminimalisir tertularnya Covid-19, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat *pandemi*, dan mempermudah masyarakat akan kebutuhan yang bersangkutan dengan bidang Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui *SilaSidakep*. Sistem ini menggantikan proses administrasi dan manajemen terdahulu berbasis manual.

SilaSidakep memanfaatkan fasilitas jaringan komputer, baik jaringan intranet, internet, maupun jaringan lainnya. Oleh karena itu, *SilaSidakep* juga dapat di definisikan sebagai suatu sistem aplikasi yang membantu menjalankan pelayanan secara daring. Sistem Informasi *SilaSidakep* juga merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengelola dan mengkomunikasikan informasi atau peralatan sistem lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk menuju *good governance*. Konsep *good governance* ini memerlukan sistem yang mengakomodir kebutuhan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak terbelit-belit. Dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian.

E-Government menjadi suatu sistem informasi yang sangat banyak digunakan sekarang ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengimplementasikan *E-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja perangkat pemerintah kabupaten Sumedang. Menyadari akan besarnya *E-Government*, sesuai dengan instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Menyadari akan besarnya manfaat teknologi informasi yang berkembang saat ini maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan sistem informasi berbasis aplikasi yakni aplikasi *SilaSidakep*. Dengan diterapkannya sistem *E-Government* diharapkan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dengan hal yang terjadi saat ini sesuai dengan ketentuan yang ada maka perlu untuk membangun sebuah sistem informasi dengan penerapan *E-Government* yang berbasis aplikasi yaitu aplikasi *SilaSidakep*. Dengan diterapkannya sistem *E-Government* diharapkan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaksesan informasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sumedang akan menjadi lebih cepat, mudah, akurat. Dengan adanya sistem yang baru, maka dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas sumber daya yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang diterapkan di berbagai dinas dan instansi salah satunya di Kecamatan Sumedang Utara.

Kecamatan Sumedang Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang, sekaligus menjadi Pusat Pemerintahan Di Daerah Kabupaten tersebut. Kecamatan ini terletak di Tengah Kota Sumedang dan merupakan kecamatan terbesar kesatu sebelum Kecamatan Sumedang Selatan menurut Jumlah penduduk. Kecamatan Sumedang Utara in juga merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang pelayanan. Konsep *SilaSidakep* ini dapat diterapkan dan dianalisa berdasarkan ketersediaan data dan informasi, konsep portal internet harus dapat mengakomodir data yang tersedia dan dibutuhkan user.

Pada instansi pemerinthan, peran kebijakan tentang sistem informasi manajemen berbasis aplikasi *SilaSidakep* sangat besar dalam mensukseskan program tata kelola pemerintahan (*E-Government*). Instansi-instansi yang sudah mengadopsi *E-Government* diharapkan mampu memperoleh predikat sebagai instansi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sub Bag. Pelayanan Umum di Kecmatan sumedang Utara memiliki tugas mengoperasikan aplikasi berbasis pelayanan online yaitu *SilaSidakep* dengan melakukan berbagai pelyanan berbasis online yang dimana menggunkan server internet sebagai akses untuk menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan Sub Bag. Pelayanan Umum Kecamatan Sumedang Utara, pengolahan informasi pelayana seperti *SilaSidakep* ini karena jaman sekarang semua dikerjakan sudah *paperless* atau tidak menggunakan kertas lagi.

Namun aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan diantaranya yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara mengenai aplikasi *SilaSidakep* tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan dan sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi dari pihak Kecamatan hal ini jelas bahwa masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara berbagai macam usia, kurangnya stabil internet di sekitar wilayah Kecamatan Sumedang Utara, oleh karena itu pihak Kecamatan sumedang Utara mendirikan akses sinyal internet berupa sinyal Wi-Fi. Selanjutnya kurangnya pemahaman dari pegawai dan masyarakat dalam proses mengruus dokumen kependudukan.

Berdasarkan hasil observasi, di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, pelayanannya sudah menerapkan sistem informasi berbasis aplikasi *SilaSidakep* namun penggunaannya masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman akan aplikasi *SilaSidakep* tersebut karena masyarakat belum mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh sehingga banyak masyarakat yang masih belum memahami aplikasi tersebut.
2. Masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi secara menyeluruh salah satunya diakibatkan oleh sebagian besar ketika pegawai kecamatan belum menguasai aplikasi *SilaSidakep* sehingga dalam membimbing masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi *SilaSidakep* belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelayanan kepada masyarakat banyak yang belum paham.
3. Jaringan internet sering dijadikan sebagai masalah besar karena penggunaan aplikasi *SilaSidakep* ini unsur utamanya adalah jaringan internet. Namun, pada realisasinya kendala sering terjadi dikarenakan oleh jaringan internet yang kurang stabil.

Oleh karena itu aplikasi *SilaSidakep* berfungsi untuk mempermudah masyarakat akan kebutuhan yang bersangkutan di bidang pelayanan kependudukan yang jenis pelayanannya meliputi pembuatan Kartu Keluarga, KTP Eleltronik, Surat Pindah, Pendaftaran Akta, yang dulunya semua aktifitas tersebut dilakukan secara manual dan konvensional, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, terstruktur dan efisien, tanpa harus menggunakan kertas lagi (*paperless*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi manajemen berbasis aplikasi *SilaSidakep* di Kecamatan Sumedang Utara?. Teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan merujuk kepada teori dari Korten (2017) terdiri dari program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sasaran penelitian ini adalah seluruh pegawai Kecamatan Sumedang Utara sedangkan Informan penelitian terdiri dari 3 orang operator aplikasi *SilaSidakep* dan 3 orang pegawai bidang pelayanan kependudukan di Kecamatan Sumedang Utara. Penentuan informan penelitian dilakukan mendasar pada teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Pengolahan dan analisis data yang digunakan melalui data display, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi *SilaSidakep* adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi yang secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi, dimana data, informasi dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi. Tujuan pengembangan aplikasi *SilaSidakep* pada kantor pemerintah daerah adalah untuk menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi pekerja dan masyarakat serta mendukung proses pengembangan *SilaSidakep*.

SilaSidakep dalam prosesnya setelah memilih layanan dan mengunggah berkas persyaratan pemohon dapat memantau perkembangan proses penerbitan dokumen yang dimohon. Tujuan dari penggunaan aplikasi *SilaSidakep* adalah:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ;
2. Mempermudah masyarakat akan kebutuhan yang bersangkutan dengan bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi *SilaSidakep* ;
3. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi; dan
4. Penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme dan kontrol kerja yang efektif

Setelah terbentuknya aplikasi *SilaSidakep* maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi dari sistem informasi manajemen berbasis aplikasi tersebut. Implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara, karena keberhasilan maupun kegagalan kebijakan dapat dilihat dari tahap implementasi kebijakan tersebut. Maka, implementasi kebijakan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil sebagaimana yang telah diharapkan.

Dunn (2000) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan (pelaksanaan program) berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Adapun menurut Grindle dalam Winarno (2014) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan (Implementasi program) adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi kebijakan mencangkup terbentuknya "*a policy delivery system*", dimana sarana- sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan- tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek seperti yang dijelaskan Korten (2017) tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat dari tiga unsur implementasi program, pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil wawancara berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa saja yang menjadi tujuan dalam menerapkan Kebijakan Sistem Informasi Manajemen	Kebijakan system informasi manajemen bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam system informasi manajemen kita akan dapat mengetahui bagaimana informasi disalurkan, mulai dari input output sampai dengan hasil akhir berupa informasi yang relevan dengan apa yang diinginkan oleh pencari informasi tersebut.
2	Apa saja kebijakan yang dibuat dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen?	Kebijakan yang dibuat dalam penerapan system informasi manajemen diantaranya adalah, bahwa setiap informasi yang dihasilkan harus merupakan informasi yang benar, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. System informasi manajemen juga harus dapat mengakomodir mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
3	Apa fungsi dari kebijakan sistem informasi manajemen di kecamatan Sumedang Utara	Fungsi dari kebijakan system informasi manajemen di kecamatan sumedang utara adalah, untuk mengakomodir berbagai jenis informasi yang akan dibutuhkan oleh pencari informasi. System informasi manajemen yang dibuat akan memudahkan pencari informasi dalam menyelksi berbagai informasi yang mana saja yang mereka perlukan sebagai bahan referensi terkait.
4	Apa saja strategi yang dibuat dalam penerapan kebijakan tentang sistem informasi manajemen berbasis aplikasi <i>SilaSidakep</i> di kecamatan Sumedang utara agar berjalan dengan baik pada kondisi saat pandemi Covid-19?	Strategi yang dibuat dalam penerapan kebijakan tentang sistem informasi manajemen berbasis aplikasi <i>SilaSidakep</i> di kecamatan Sumedang utara agar berjalan dengan baik pada kondisi saat pandemi Covid-19 adalah dengan cara membuat system aplikasi <i>SilaSidakep</i> tersebut agar menjadi system yang dapat diandalkan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan.
5	Sejauhmana sosialisasi yang dilakukan pembuat program kepada para pegawai / ASN dan masyarakat mengenai kebijakan tentang sistem manajemen berbasis aplikasi <i>SilaSidakep</i> di kecamatan Sumedang utara pada saat masa pandemi Covid-19?	Sosialisasi dilakukan kepada para pegawai ASN melalui seminar ke setiap instansi instansi terkait, yang nantinya akan disebarkan kembali ke setiap lembaga lembaga masyarakat sampai pada tokoh tokoh masyarakat setingkat RT/RW
6	Bagaimana respon pegawai ASN dan masyarakat mengenai kebijakan tentang sistem manajemen berbasis aplikasi	Respon respon pegawai ASN dan masyarakat mengenai kebijakan tentang sistem manajemen berbasis aplikasi <i>SilaSidakep</i> di kecamatan Sumedang utara adalah menanggapi dengan baik dengan adanya aplikasi <i>SilaSidakep</i>

	<i>SilaSidakep</i> di kecamatan Sumedang utara?	tersebut, karena dengan adanya aplikasi tersebut masyarakat tidak harus datang ke setiap tempat untuk mengurus keperluannya mengenai dokumen kependudukan
7	Bagaimana proses kebijakan aplikasi <i>SilaSidakep</i> ?	Proses kebijakan aplikasi <i>SilaSidakep</i> dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama yaitu mengakomodir masyarakat yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke tempat disduk / kantor kecamatan. Masyarakat hanya tinggal masuk dan mengisi form form yang dibutuhkan dalam aplikasi <i>SilaSidakep</i> tersebut.
8	Kebijakan tersebut sudah sesuai dengan target yang telahditentukan?	Pada saat ini kebijakan aplikasi <i>SilaSidakep</i> dapat dikatakan belum memenuhi target, dikarenakan terapat beberapa kendala kendala dalam pelaksanaannya. Seperti masih terdapat masyarakat dalam golongan orang tua yang tidak begitu paham mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Serta sering terjadinya error yang mengakibatkan halaman aplikasi <i>SilaSidakep</i> tidak dapat diakses.

Sumber: Hasil Penelitian 2022.

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan implementasi suatu kebijakan perlu memperhatikan keseimbangan dari program, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran. Kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kessuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratka oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan cepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendaptkan output program (Korten, 2017).

Berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *SilaSidakep*, konsep *SilaSidakep* yang diterapkan telah dianalisis berdasarkan ketersediaan data dan informasi. Konsep portal internet harus dpat mengakomodir data yang dibutuhkan user. Dianalisis juga dpt penggunaan data tertentu terhadap efisiensi proses dalam aplikasi. Berikut adalah analisa kebutuhan dari pengguna.

1. Mengefesiensian waktu, *SilaSidakep* ini diartikan sebagai pemohon dokumen cukup duduk manis di rumah tanpa harus pergi ke kantor pelayanan. Cukup melalui web aplikasi *SilaSidakep*;
2. Menyediakan kualitas pelayann untuk melayani penertiban dokumen kependudukan selama pandemi;
3. Mengestimasi biaya, dalam pelayanan ini masyarakat tidak dimintai uang dministrasi (gratis) sehingga mencegah pungli dengan transparasi proses;
4. Meningkatkan efisiensi kerja dengan penerapn Online Document yang mendukung konsep *paperless*;
5. Memberikan kepastian akan kebijakan, aplikasi ini kan sangat mungkin dikembangkan lebih maksimal sesuai kebutuhan.

SIMPULAN

Aplikasi *SilaSidakep* merupakan aplikasi online yang dibuat oleh Disdukcapil yang salah satunya diimplementasikan oleh Kecamatan Sumedang Utara yang bertujuan untuk mengakomodir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan seperti ktp, suray ahli waris dan dokumen dokumen lainnya. Hal tersebut dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *SilaSidakep* untuk meminimalisir mobilitas masyarakat yang saat ini sedang dalam masa pandemi Covid19.

Pada prakteknya aplikasi *SilaSidakep* sudah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mengurus kebutuhan dokumen kependudukan, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya. kekurangan tersebut beberapa diantaranya adalah, kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi *SilaSidakep* sehingga masih ada saja masyarakat yang datang langsung ke kantor kecamatan sumedang utara untuk mengurus kebutuhan pengurusan dokumen kependudukan. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi *SilaSidakep* tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi sehingga implementasi aplikasi *SilaSidakep* baru dipergunakan oleh masyarakat milenial yang sudah melek teknologi.

Dukungan dari berbagai pihak mengenai sosialisasi aplikasi *SilaSidakep* juga masih kurang, serta terbatasnya kemampuan sistem yang seringkali membuat aplikasi *SilaSidakep* susah diakses. Kendala Jaringan pun kerap kali membuat aplikasi *SilaSidakep* mengalami error. Keamanan data masyarakat yang mengakses aplikasi *SilaSidakep* juga menjadi faktor penting mengingat pernah suatu ketika aplikasi *SilaSidakep* juga mengalami hack (pembajakan)

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Aditama Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. ArLkulasi Konsep Implementasi Kebijakan (PerspekLf Model Dan Kriteria Pengukurannya). *Jurnal HartaP*.
- Anggara, Sahya. 2006. *Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governemance)*. Bandung: Pustaka SePa.
- Dunn. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hasibuan, Melayu Sp. 2019. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua puluh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta,CV.
- Marshall, Romney. 2015. *AccounLng InformaLon System (Sistem Informasi Akuntansi)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Munandar, Iwan., Irawan, R.S., Rohmat, Haryani, Yani. 2012. Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupal No.43 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis program beras untuk keluarga miskin (RASKIN). *PPA*. STIA Sebelas April.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media KompuPndo Kelompok Gramedia.
- Pratama, Cecep, H.S. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. STIA Sebelas April.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Analisa Manajemen (Suatu Kajian Dasar Dengan Pendekatan Sisi KuanLtaLf)*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Ilmu Administrasi*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika.
- Silitonga, Romauly, F. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengatasan Kemiskinan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Negeri Malang.

- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2014. *Manajemen Publik (Teori, Proses, Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)